

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, karena memiliki beranekaragam budaya, agama, adat istiadat, ras, bahasa, dan suku. Setiap suku itu memiliki banyak hal yang berbeda dari suku lain. Indonesia pula merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural, agama maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Bangsa Indonesia ini mempunyai multikulturalitas yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan vertikal dan perbedaan horizontal. Perbedaan vertikal ditandai dengan realitas adanya pelapisan sosial atas bawah dalam struktur kemasyarakatan sebagai akibat perbedaan masing-masing individu di bidang politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Sedangkan perbedaan horizontal adalah perbedaan masyarakat berdasarkan kesatuan sosial, budaya, suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan agama.

Bhineka Tunggal Ika memuat identitas multikulturalisme di Indonesia. Ini membuktikan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Negeri ini menjadi pengaruh multimental (India, China, Belanda, Portugis, Hinduisme, Buddhisme, Islam, Kristen, Kapitalis, dan seterusnya). “Indonesia”, adalah bangsa dengan makna yang berbeda-beda melalui historis, ideologis, dan religius.¹

Menurut Will Kymlicka, masyarakat moderen semakin didasari sebagai masyarakat multikultural, yakni sebuah masyarakat yang tersusun dari berbagai

¹ Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, Terj. F Budi Hardiman (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2011), hlm. 7.

macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai dengan sebuah “Negeri” dengan banyak “Bnagsa”.²

Adanya perbedaan tersebut tidak hanya memberikan keunikan dan keindahan, tetapi juga dapat menimbulkan konflik antar setiap suku yang membawa pada kekerasan. Hal tersebut terjadi karena adanya rasa egoisme dan sentimen pada setiap suku, ras, etnis, agama, dan golongan tertentu dalam mengklaim kebenarannya terhadap golongan lain.

Berdasarkan sebuah artikel yang berjudul ‘*Hanya 30 persen konflik Berakal Agama*’, terdapat pada surat kabar Suara Merdeka Kamis 24 Oktober 2013 dengan nara sumber Mantan ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi berbincang dengan pemimpin redaksi Suara Merdeka menyatakan bahwa:

Kerusuhan antar nama agama muncul dan terbesar di beberapa daerah di Indonesia terjadi 10 tahun setelah reformasi. Pada dasarnya benturan tersebut terjadi bukan berakar pada agama, tetapi pada persoalan lain yang membawa simbol agama. Seperti yang diawali dengan masalah politik, pemberontakan, perebutan kekuasaan, masalah sosial, ekonomi, dan budaya, namun acap kali dibelokkan menjadi masalah agama.

Hal tersebut di atas, dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara akhlak, fiqih, dan dakwah. Karena nilai-nilai akhlak dipengaruhi oleh fiqih dan sosialisasi atau dakwah. Karena nilai-nilai akhlak dipengaruhi oleh fiqih dan sosialisasi atau dakwah. Warga NU menerapkan prinsip ketika ada kejelekan dan kemungkar, tidak dimusuhi, tetapi dihormati dan berupaya memperbaikinya. Ini dilakukan demi terjadinya ketenangan sosial di masyarakat.³

² Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural...*, hlm. 64.

³ Artikel “*Hanya 30 persen Konflik Berakar Agama*”, Suara Merdeka, Kamis 24 Oktober 2013, hal.2.

Berdasarkan artikel di atas bahwa konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan tersebut dapat diatasi dengan bimbingan yang baik, bukan malah di lawan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui proses pendidikan sejak dini. Seorang anak dibimbing dan dikenalkan dengan guru dengan prinsip *Bhineka Tunggal Ika* yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Selain itu, anak juga diberikan bekal keagamaan yang baik dan diberikan contoh perilaku saling menghargai, menghormati, dan bersedia menerima perbedaan yang ada di sekitar lingkungan hidupnya. Tidak hanya pihak sekolah saja yang mendidik dan membimbing anak, namun orang tua pun memiliki peran yang penting dalam tugas ini. Pendidikan yang diberikan orang tua di rumah sangat penting dan mendasar bagi pembentukan karakter anak. Apalagi anak hidup di lingkungan masyarakat yang majemuk seperti bangsa Indonesia ini. Jika orang tua tidak membekali anaknya dengan pendidikan toleransi sejak dini, maka kemungkinan anak dapat terjerumus dalam kekerasan sosial dan memiliki sifat egois terhadap orang lain. Anak juga akan berfikir bahwa orang lain yang berbeda keyakinan dengan anak tersebut dianggap sebagai musuh bukan saudara.

Berbagai macam adat-istiadat dengan beragam ras, suku bangsa, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia, ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi kekayaan ini merupakan khazanah yang patut dipelihara dan memberikan nuansa dan dinamika bagi bangsa, dan di sisi lain dapat pula merupakan titik pangkal perselisihan, konflik vertikal dan horizontal. Kritis multidimensi yang berawal sejak pertengahan 1997 dan ditandai dengan kehancuran perekonomian nasional, sulit dijelaskan secara mono-kausal.⁴ Keragaman ini diakui atau tidak, banyak menimbulkan

⁴ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta : 2005). Hlm. 21.

berbagai persoalan sebagaimana yang kita lihat saat ini. Kurang mampunya individu-individu di Indonesia untuk menerima perbedaan itu mengakibatkan hal yang negatif.

Kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat yang plural, seringkali terjadi konflik yang pada akhirnya akan menyebabkan terganggunya stabilitas dan ketidakharmonisan. Di Indonesia seringkali muncul fenomena kekerasan seperti konflik etnis, konflik antar umat beragama, dan konflik lainnya. Salah satu contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan beragama yang plural ini adalah kecurigaan dan kesalahpahaman dari satu penganut agama terhadap sikap dan perilaku agama lain, bahkan juga terhadap sesama penganut agama tertentu.

Jika dilacak, akar penyebab konflik antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya memang cukup beragam. Ada faktor kesenjangan ekonomi, persetaraan politik, perbutan kekuasaan, atau persaingan antar agama. Namun demikian, dari sebagian besar konflik dan kekerasan yang ada, “agama” dinilai menjadi salah satu faktor yang ikut andil sebagai pemicu.⁵

Dewasa ini, Banyak fenomena yang diketahui baik dari media massa, surat kabar atau di lingkungan sekitar, bahwasanya kerukunan dan toleransi antar umat beragama semakin tidak melekat pada diri individu maupun kelompok. baik orang dewasa maupun kanak-kanak titik Mereka cenderung anarkis dan apatis terhadap pemeluk agama lain sehingga kekerasan sering kali terjadi di Tengah sebagian pemeluk agama, dan perpecahan mulai timbul sehingga mereka memilih untuk

⁵ Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 15.

berkelompok sesuai dengan keyakinan masing-masing. Masalah tersebut terjadi karena tidak adanya sikap toleransi.

Kita Agama dapat menjadi sumber moral dan etika. Konflik kekerasan, dan reaksi destruktif akan muncul apabila agama kehilangan kemampuan untuk merespons secara kreatif terhadap perubahan sosial yang sangat cepat. setiap agama tentu mengajarkan nilai-nilai yang melahirkan norma atau aturan tingkah laku para pemeluknya, memberi kemungkinan bagi Agama untuk berfungsi menjadi pedoman dan petunjuk bagi pola tingkah laku corak sosial. Kerjasama antar agama diperlukan untuk menerjemahkan kesadaran atas hakikat dasar moralitas dan sikap moral terhadap realitas sosial serta keinginan untuk menghormati orang lain.⁶

Oleh karena itu diperlukan adanya sikap toleransi dari tiap individu yang beragam itu. Sikap ini dapat saling membantu bekerja sama dalam membangun negara menjadi lebih baik. untuk menjadi individu-individu yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan menghormati individu lainnya diperlukan adanya pemahaman, bahwa perbedaan bukanlah menjadi satu persoalan. Yang paling penting adalah bagaimana menjadikan perbedaan itu menjadi indah, dinamis dan membawa berkah.

Sebagai sebuah ide, nilai-nilai toleransi terserap dalam berbagai Interaksi yang ada dalam berbagai struktur sosial masyarakat yang tercakup dalam kehidupan sosial kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai toleransi juga harus

⁶ Nurcholish Madjid, *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 20.

menjelaskan hak persamaan dalam berbagai permasalahan masyarakat, melingkupi politik dan demokrasi pendidikan, keadilan dan penegakan hukum (*law enforcement*) kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya community dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral dan tingkat serta mutu produktivitas.

Nilai-nilai toleransi dalam praktik merupakan suatu strategi dari integrasi sosial dimana keanekaragaman budaya benar-benar diakui dan dihormati, sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam menengarai setiap isu separatisme dan disintegrasi sosial. Pengalaman mengajarkan, bukan semangat kemanunggalan atau ketunggalan (*tunggal ika*) yang paling potensial yang bisa melahirkan persatuan kuat, tetapi justru pengakuan terhadap adanya pluralitas (kebhinekaan) budaya bangsa inilah yang lebih menjamin persatuan bangsa menuju pembaruan sosial yang demokratis.

Pemahaman keberagaman yang multikultural berarti menerima adanya keragaman ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan. Untuk itu maka Sudah Selayaknya wawasan multikulturalisme khususnya sikap toleransi dibumikan dalam dunia pendidikan kita. Wawasan multikulturalisme sangat penting utamanya dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan semangat kemerdekaan RI 1945 sebagai tonggak sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, Indonesia sebagaimana dikuatkan oleh para ahli yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan multietnik justru menjadikan multikulturalisme sebagai pembelajaran yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika, dominasi kebudayaan mayoritas, warisan dari persepsi dan pengelolaan Bhinneka Tunggal Ika yang

kurang tepat di masa lalu berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Kurangnya pemahaman multikultural yang komprehensif justru menyebabkan degradasi moral generasi muda. Sikap dan perilaku yang muncul seringkali tidak Simpati, bahkan sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya nenek moyang. Sikap-sikap seperti kebersamaan, penghargaan terhadap orang lain, kegotongroyongan mulai pudar. Adanya arogansi akibat dominasi kebudayaan mayoritas menimbulkan kurangnya pemahaman dalam berinteraksi dengan budaya maupun orang lain.⁷

Bangsa ini tidak boleh dibiarkan terkoyak-koyak atau terpecah-pecah, harus ada usaha untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan dan kesatuan yang dulu menjadi modal penting untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Harus mulai menanamkan nilai-nilai toleransi baik dari sisi agama, budaya, etnis maupun bahasa untuk bisa hidup saling berdampingan secara damai. Prinsip Ini mesti ditanamkan sejak dini, salah satunya melalui pendidikan.

Pendidikan multikultural memberikan secercah harapan dalam mengatasi berbagai Gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini mengingat pendidikan multikultural adalah pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan, heterogenitas pluralitas dan keragaman, apapun aspek dalam masyarakat.⁸ Penanaman nilai-nilai multikultural tersebut harus ditanamkan pada setiap jenjang pendidikan dan harus melibatkan sebagai tatanan masyarakat dalam membentuk karakter anak didik khususnya dalam memahami dan saling

⁷ Rosita Endang Kusmaryani. Pendidikan Multikultural sebagai Alternatif Penanaman Nilai Moral dalam Keberagaman. *Jurnal Paradigma*, edisi. 2. Tahun. 2006. Hlm. 50.

⁸ Sitti Mania. Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran. *Jurnal Lentera Pendidikan*. Edisi 13. Tahun. 2010. Hlm. 83.

menghormati antara berbagai suku sehingga menjadi kontribusi dalam usaha mentransformasikan nilai dan karakter budaya lokal yang berwawasan nasionalisme.⁹

Pendapat kamanto Sunarto, “pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat”.¹⁰

Pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk kehidupan publik, selain itu juga diyakini mampu memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk politik dan kultural. Dengan demikian pendidikan sebagai media untuk menyiapkan dan membentuk kehidupan sosial, sehingga akan menjadi basis institusi pendidikan yang sarat akan nilai nilai idealisme.¹¹

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah:

“Satu upaya dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri kepribadian

⁹ Muh. Jaelani Al Pansori, dkk, Pendidikan Multikultural dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Untuk siswa SMP di Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Pasca UNS*, edisi 1. Tahun. 2010. Hlm. 83.

¹⁰ Kamanto Sunarto, Multicultural Education in Schools, Challenges in its Implementation, *Jurnal Multicultural Education In Indonesia And South East Asia*, edisi I, Tahun. 2004. Hlm. 47.

¹¹ M. Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik, dan Kekuasaan*, (Resist Book, Yogyakarta: 2008), hlm. 81.

kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara.”¹²

Dalam peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Pasal 1 Bab 1 telah dijelaskan tentang pendidikan agama. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.¹³

Berdasarkan peraturan perundangan di atas, pemerintah mengharapkan kepada seluruh lembaga pendidikan khususnya sekolah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan agama maupun pendidikan keagamaan sesuai dengan potensi setiap siswa. Sekolah harus memiliki strategi yang baik dalam pencapaian tujuan pendidikan agama tersebut.

Pendidikan agama mulai resmi masuk dalam ruang publik sekolah pada tanggal 29 Desember 1945, ketika menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan membentuk panitia penyelidik pendidikan yang berhasil merumuskan sistem dan kurikulum pendidikan sekolah menengah pertama yang menggantikan sekolah menengah yang diciptakan oleh Jepang. Pada masa itu pendidikan agama telah

¹² Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, hlm. 146.

¹³ www.kemendiknas.go.id/file/dokumen/PP5507.pdf. (07/07/2016, 14:00 wib)

masuk dalam kurikulum SMP meskipun sebelumnya Ki Hajar Dewantara sebagai menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan telah menyampaikan bahwa agama dalam pengajaran di sekolah adalah soal lama dan terus-menerus menjadi persoalan yang sulit. Kesulitan ini terjadi terutama karena adanya tuntutan supaya sifat keagamaan diberi bentuk yaitu “pengajaran agama”, yang mana hakikat syariat agama diberi bentuk yang pasti dan tertentu.

Adanya tuntutan akan pendidikan agama di sekolah tidak saja di desak oleh kelompok penganut agama, namun dalam perkembangannya, pendidikan agama di ruang sekolah juga dimaknai sebagai pendidikan untuk menghalau “pengaruh komunis”. Ketika Rezim Soeharto secara sistematis menggiring warga negara menggunakan stempel agama yang dibatasi lima macam agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Demikian hingga kini pendidikan agama turut mewarnai format hubungan agama dan negara yang masih dalam proses pencarian model yang paling mawadahi aspirasi masyarakat sekaligus diharapkan bisa mendukung pendewasaan dalam berbangsa dan bernegara.¹⁴

Oleh karena itu seorang guru Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan serta menanamkan nilai-nilai toleransi dalam tugasnya sehingga mampu melahirkan peradaban yang saling menghargai. Dengan demikian, kalau ingin mengatasi segala problematika masyarakat dimulai dari penataan secara sistematis dan metodologis dalam pendidikan sebagai salah satu komponen dalam pembelajaran. Untuk memperbaiki realitas masyarakat, perlu dimulai dari proses pembelajaran multikultural bisa dibentuk dengan menggunakan

¹⁴Artikel *Pendidikan Agama dalam Masyarakat Multikultu* Oleh Listia <http://interfidei.or.id/index.php?page=article&id=1>. (07/07/2016. 14.30 WIB)

pembelajaran berbasis multikultural. Yaitu proses pembelajaran yang lebih mengarah pada upaya menghargai perbedaan di antara sesama manusia sehingga terwujud ketenangan dan ketentraman tatanan kehidupan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sekolah adalah salah satu media pemahaman tentang mengembangkan nilai-nilai toleransi tersebut. Asumsi di atas sangat dibutuhkan termasuk guru PAI yang berperan sebagai mediator untuk memotivasi semangat belajar peserta didik. Sebab guru dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui kondisi belajar dan juga permasalahan belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Guru yang kreatif selalu mencari bagaimana caranya agar proses belajar mengajar mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Ditinjau dari permasalahan yang ada di Negara kita ini, maka untuk mengetahui proses pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dapat melalui penelitian yang penulis lakukan dengan judul **“Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-Nilai toleransi Beragama Siswa Di SMA Negeri 1 Kotamobagu.”**

Pada penelitian ini penulis meneliti sekolah tersebut karena SMA Negeri 1 Kotamobagu merupakan salah satu sekolah unggulan di Kota Kotamobagu. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan bahwa sekolah tersebut telah berusaha menerapkan pendidikan toleransi antar warga sekolah yang berbeda-beda asalnya, baik itu budaya, status ekonomi dan khususnya antar agama. Agama yang dianut oleh para siswa di SMA Negeri 1 Kotamobagu meliputi agama Islam yang berjumlah 906 siswa, Kristen dengan jumlah 263 siswa, Khatolik berjumlah 6 siswa, Hindu berjumlah 24 siswa dan Budha berjumlah 1 siswa.

Secara umum, siswa SMA Negeri 1 Kotamobagu dalam kesehariannya (sekolah) terlihat dari sikap bergaul, belajar, bermain, dan lain sebagainya sangat mencerminkan sikap toleransi. Meskipun mereka hidup dalam satu lembaga pendidikan yang warga sekolahnya berlatar belakang keyakinan agama yang berbeda-beda, tetapi mereka dapat menjalankan pendidikan dengan tentram dan damai. Setiap siswa di SMA Negeri 1 Kotamobagu tersebut mendapatkan hak pendidikan secara adil, damai dan harmonis. Walaupun SMA Negeri 1 Kotamobagu mayoritas siswanya beragama Islam, hal itu tidak menyulitkan para pendidik untuk menanamkan nilai-nilai toleransi atau hidup saling berdampingan antara satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari penerapan ketika siswa diajarkan untuk membantu siswa lain yang sedang mengalami kesusahan, seperti memberikan bantuan kepada teman yang terkena musibah.

Untuk menanamkan sikap menghargai orang lain yaitu pendidik mengajarkan kepada siswa untuk bersikap dan berprasaangka baik kepada teman sebayanya maupun orang yang lebih tua darinya. SMA Negeri 1 Kotamobagu mengajarkan kepada siswanya untuk saling menghormati, menghargai, bekerjasama dan saling tolong menolong, sikap saling menghormati ditunjukkan ketika berdoa, saat di dalam kelas siswa berdoa sesuai keyakinannya masing-masing, sedangkan saat upacara doa diucapkan dengan bahasa indonesia, karena tidak semua siswa memiliki kepercayaan yang sama.

Pentingnya penanaman nilai-nilai toleransi beragama di tanamkan sedini mungkin karena saat anak mulai bergaul dengan temannya maka dia akan mulai merasakan perbedaan itu. Toleransi antar umat beragama berarti menghormati dan peduli terhadap pemeluk agama lain, tidak memaksa mereka mengikuti agamanya

dan mencampuri urusan agama masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, pendidik diharapkan mengetahui langkah-langkah untuk melaksanakan strategi yang akan dipakai dalam penanaman nilai-nilai toleransi antar umat beragama, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara efektif.

